

Penerapan SAK ETAP dan Faktor Pendukungnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Era Digital

Reva Salsabil Khansa¹, Naiya Savilka², Reza Azmah Fadhillah³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat
revasalsabilkhansaa@gmail.com, naiyasavilka51@gmail.com, rezaasmafadilla@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 29/10/2025

Revised 29/10/2025

Accepted 31/10/2025

Abstract

This study aims to comprehensively investigate the implementation of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) along with the factors that support and hinder its effectiveness in producing high-quality financial reports for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) amid the current developments in digital technology. The application of SAK ETAP plays an important role in improving the transparency, accountability, and credibility of MSME financial reports, which are the main basis for economic decision-making, fund procurement, and business operational sustainability. However, conditions in the field show that the implementation of SAK ETAP still faces a number of challenges, such as low understanding of accounting, limited human resources, lack of education programs, and suboptimal use of information technology. This study applies a combination of qualitative and quantitative methods through case studies of various types of MSMEs in Indonesia, including Village-Owned Enterprises (BUMDes), savings and loan cooperatives, and service providers. The analysis shows that the level of understanding of standards, technological assistance, internal control mechanisms, and management capabilities have a significant impact on the quality of financial reports. Therefore, guidance, in-depth training programs, and digital transformation of accounting systems are necessary as strategic steps to encourage more effective implementation of standards and ensure continuous improvement in the quality of MSME financial information, as well as strengthen the competitiveness, operational efficiency, and adaptability of MSMEs to the current global economic dynamics.

Keywords: SAK ETAP, MSMEs, financial reports, digitalization, and mentoring

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) beserta faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Penerapan SAK ETAP memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas laporan keuangan UMKM, yang menjadi dasar utama pengambilan keputusan ekonomi, pengadaan dana, dan keberlanjutan operasional bisnis. Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa implementasi SAK ETAP masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya program pendidikan, dan penggunaan teknologi informasi yang kurang optimal. Penelitian ini menerapkan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif melalui studi kasus berbagai jenis UMKM di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi simpan pinjam, dan penyedia jasa. Analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman standar, bantuan teknologi, mekanisme pengendalian internal, dan kemampuan manajemen memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, bimbingan, program pelatihan mendalam, dan transformasi digital sistem akuntansi diperlukan sebagai langkah strategis untuk mendorong implementasi standar yang lebih efektif dan memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas informasi keuangan UMKM, serta memperkuat daya saing, efisiensi operasional, dan adaptasi UMKM terhadap dinamika ekonomi global saat ini.

Kata Kunci: SAK ETAP, UMKM, laporan keuangan, digitalisasi, dan pendampingan



©2025 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang tak tergantikan sebagai fondasi utama dan tulang punggung yang mendukung stabilitas, ketahanan, dan perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Di tengah lingkungan ekonomi global yang semakin volatil, bergejolak, dan sangat kompetitif, keberadaan UMKM telah terbukti esensial, bahkan melampaui fungsinya sebagai pelengkap bagi usaha skala besar. Peran UMKM tidak hanya terlihat dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas, terutama dalam mendistribusikan kemakmuran secara merata dan menciptakan peluang kerja yang mencakup semua lapisan masyarakat. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, lebih dari 99% entitas usaha yang terdaftar di Indonesia termasuk dalam kategori UMKM. Sektor ini secara konsisten menunjukkan kekuatan ekonomi yang luar biasa dari masyarakat, sebagaimana terlihat dari kontribusinya yang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan kemampuannya menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, yaitu lebih dari 90% dari total penyerapan tenaga kerja di tingkat nasional. Kontribusi yang signifikan ini menempatkan UMKM sebagai mesin utama yang menggerakkan kehidupan masyarakat dan memberikan potensi bagi mereka untuk berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti kuat, bahkan selama krisis global yang paling parah, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sementara banyak perusahaan besar yang sangat bergantung pada rantai pasokan internasional dan investasi modal besar mengalami penurunan operasional dan keuangan yang signifikan, UMKM menunjukkan ketahanan yang lebih besar. Keluwesan operasional, biaya operasional yang relatif rendah, dan ikatan emosional serta geografis yang erat dengan pasar lokal membuat mereka menjadi entitas yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan pesat UMKM, entitas lain yang menjadi komponen penting ekonomi akar rumput, seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga memainkan peran yang semakin krusial. Koperasi berfungsi sebagai platform efektif untuk meningkatkan daya tawar kolektif, sementara BUMDes telah berkembang menjadi perpanjangan strategis pemerintah desa dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi secara produktif dan otonom, sehingga memperkuat sinergi ekosistem ekonomi komunitas yang tangguh dari tingkat paling dasar.

Namun, meskipun peran strategis dan kontribusi ekonomi yang tak terbantahkan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal yang membatasi potensi penuh mereka. Salah satu hambatan fundamental dan persisten yang paling penting adalah kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Di era saat ini, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, praktik pelaporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, tetapi juga menjadi persyaratan esensial untuk membangun dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang disusun secara teratur, terorganisir, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku merupakan bukti nyata kredibilitas dan tata kelola yang baik dari suatu unit bisnis.

Secara mendasar, laporan keuangan memiliki tiga peran yang saling terkait dan penting: sebagai alat untuk menilai kinerja dan dasar pengambilan keputusan strategis; sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan otoritas pengawas; dan, yang paling esensial untuk kemajuan, sebagai prasyarat untuk memperoleh pendanaan atau pinjaman dari lembaga perbankan resmi. Saat melakukan penilaian kredit, bank sepenuhnya mengandalkan laporan keuangan terutama neraca dan laporan laba rugi sebagai acuan utama untuk mengukur kemampuan pembayaran, likuiditas, dan profitabilitas calon peminjam. Tanpa laporan keuangan yang valid, dapat diaudit, dan dapat diandalkan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara otomatis berada dalam posisi yang lemah saat berurusan dengan lembaga keuangan, sehingga terjebak dalam siklus pembiayaan informal yang mahal yang membatasi ekspansi bisnis mereka.

Ironisnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha UMKM di Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar dasar. Banyak di antara mereka masih mengandalkan metode pencatatan manual yang sangat sederhana, yang umumnya hanya berupa buku kas harian tanpa pengelompokan transaksi yang terstruktur, apalagi entri jurnal. Metode pencatatan sederhana ini tidak hanya menyulitkan penilaian kinerja, tetapi juga menghasilkan data keuangan yang tidak akurat, tidak bermakna, terlambat, dan sulit dibandingkan. Penelitian akademis sebelumnya secara konsisten menunjuk pada sumber masalah ini, dengan temuan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dasar tentang prinsip akuntansi, tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan pemilik usaha, dan akses terbatas terhadap program pendidikan akuntansi yang terjangkau dan sesuai merupakan faktor utama di balik kualitas buruk laporan

keuangan UMKM. Situasi ini diperparah oleh kesalahpahaman di kalangan banyak pengusaha UMKM yang memandang proses akuntansi sebagai hal yang rumit, tidak penting, atau bahkan hanya relevan bagi perusahaan besar, sehingga menjadi prioritas rendah.

Untuk mengatasi tantangan struktural ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Institut Akuntan Indonesia (IAI) mengambil inisiatif untuk meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Tanggung Jawab Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009, yang dirancang sebagai versi yang sangat disederhanakan dari standar akuntansi umum berdasarkan IFRS. Tujuan utama SAK ETAP adalah memberikan pedoman untuk menyusun laporan keuangan yang lebih mudah dipahami, ringkas, dan praktis bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, seperti sebagian besar UMKM, koperasi, dan perusahaan milik desa. Selain itu, pada tahun 2018, DSAK IAI meluncurkan standar yang lebih sederhana lagi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan entitas mikro dan kecil dengan keterbatasan sumber daya yang paling parah. SAK ETAP dan SAK EMKM menyediakan berbagai penyederhanaan penting, termasuk penghapusan penilaian kembali nilai wajar dan penghapusan kewajiban untuk mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan, dengan menekankan penggunaan model biaya historis dan memprioritaskan substansi ekonomi transaksi, sehingga penerapan standar ini menjadi lebih praktis.

Meskipun kerangka regulasi seperti SAK ETAP dan SAK EMKM tersedia dan dianggap sebagai pendekatan yang tepat, implementasinya di kalangan UMKM, koperasi, dan BUMDes belum menghasilkan hasil yang memadai dan adil. Temuan dari penelitian empiris di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM, koperasi, dan BUMDes masih tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, atau bahkan tidak menyusunnya sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketersediaan regulasi yang disederhanakan dan tingkat kepatuhan dalam praktik. Kesenjangan ini menyoroti kebutuhan akan penelitian dan analisis mendalam mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat yang secara signifikan mempengaruhi implementasi SAK ETAP/EMKM. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha atau manajer, intensitas dan kualitas sosialisasi dan pelatihan dari regulator dan lembaga keuangan, serta aspek internal entitas usaha seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, merupakan faktor penentu utama.

Dalam konteks pembahasan tentang literasi dan standar, tantangan dan peluang baru muncul seiring dengan percepatan digitalisasi global. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara UMKM memandang pengelolaan seluruh operasi bisnis mereka, termasuk aspek-aspek dasar akuntansi dan pelaporan. Dalam situasi ini, Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Digital (SIA) telah muncul sebagai faktor penting dan pendorong utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital memungkinkan UMKM mencatat transaksi secara real-time dan otomatis, menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan secara instan, serta mengurangi risiko kesalahan input data. Penggunaan teknologi akuntansi ini semakin penting dan mendesak dalam konteks pergeseran menuju konsep Society 5.0, di mana teknologi digital terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan dan kesiapan UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi digital, terutama dalam pencatatan dan akuntansi, akan menjadi faktor utama dalam daya saing dan kelangsungan bisnis mereka di masa depan. Penelitian empiris menunjukkan kontribusi positif dan signifikan dari implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam hal ketepatan waktu dan keandalan data yang disajikan.

Selain itu, digitalisasi telah membuka peluang untuk pengembangan ekosistem akuntansi digital berbasis cloud yang relatif murah, mudah diakses, dan ramah pengguna bagi UMKM. Aplikasi akuntansi berbasis mobile atau web saat ini menawarkan solusi akuntansi yang sangat praktis bagi UMKM yang belum memiliki kapasitas finansial dan sumber daya untuk mempekerjakan akuntan internal. Dengan menerapkan teknologi yang tepat, UMKM dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan kesalahan, meningkatkan efisiensi dalam hal waktu dan biaya administratif, serta memperkuat posisi mereka dalam ekosistem bisnis yang menuntut kecepatan dan integrasi data. Namun, proses adopsi teknologi akuntansi ini menghadapi berbagai hambatan, seperti infrastruktur digital yang terbatas, biaya awal untuk pengadaan sistem, literasi digital dan kemampuan teknis yang rendah di kalangan pemilik usaha, serta resistensi alami terhadap inovasi. Oleh karena itu, pendekatan intervensi yang efektif perlu dirancang tidak hanya untuk menyoroti pentingnya teknologi,

tetapi juga melibatkan program pendidikan, bimbingan, dan bantuan keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing jenis UMKM.

Mengingat konteks keseluruhan, munculnya masalah struktural, serta peluang dan hambatan yang muncul di era digital, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam, rinci, dan relevan mengenai situasi implementasi SAK ETAP/EMKM oleh UMKM, koperasi, dan BUMDes. Secara khusus, penelitian ini secara mendalam menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM, dengan fokus utama pada peran teknologi digital dan sistem informasi akuntansi (AIS) sebagai variabel independen yang semakin vital dalam menentukan efektivitas pelaporan keuangan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus mendalam. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi realitas di lapangan secara komprehensif, kaya konteks, dan intensif, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang interaksi kompleks antara standar akuntansi, kemampuan sumber daya manusia, dan fungsi teknologi dalam lingkungan UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah, regulator, dan lembaga pendukung UMKM dalam mengembangkan pendekatan yang lebih efisien untuk meningkatkan literasi keuangan dan kualitas pelaporan UMKM di Indonesia, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara fundamental menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena adanya kebutuhan mendesak untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena kompleks penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada makna, pengalaman subjektif, dan konteks sosial di balik praktik pelaporan keuangan. Tujuan utamanya adalah mengungkap "mengapa" dan "bagaimana" pelaku UMKM menyusun laporan keuangan mereka, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar. Metode kualitatif, dengan karakternya yang holistik, memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang kaya akan konteks, kompleksitas realitas di lapangan, serta dinamika yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui angka atau statistik semata.

Jenis penelitian studi kasus (*case study*) dipilih secara spesifik karena menawarkan kerangka kerja yang ideal untuk melakukan penyelidikan intensif dan mendalam terhadap satu atau beberapa unit analisis dalam batasan waktu dan tempat tertentu. Studi kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer secara detail, memanfaatkan berbagai sumber bukti untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Dalam konteks ini, studi kasus memungkinkan fokus pada operasional harian, keputusan manajerial, dan hambatan teknis yang dihadapi UMKM dalam proses implementasi SAK ETAP, menjadikannya metode yang paling tepat untuk menangkap kekayaan data kontekstual yang diperlukan.

Unit analisis sentral dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di sektor jasa dan perdagangan, yang memiliki pengalaman langsung atau sedang dalam proses penerapan SAK ETAP dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan mereka. Pemilihan kedua sektor ini didasarkan pada kontribusi dominan mereka terhadap populasi UMKM dan keragaman jenis transaksi yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang tantangan akuntansi. Fokus utama dari studi ini adalah untuk memahami pengalaman nyata, *lived experience*, pelaku usaha dalam menghadapi tuntutan pelaporan keuangan berbasis standar, termasuk bagaimana mereka memanfaatkan sistem informasi akuntansi dan teknologi digital seperti aplikasi kasir atau software akuntansi berbasis cloud dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan mereka.

Penelitian ini dilakukan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi di Indonesia. Pemilihan lokasi ini bersifat *purposive* (bertujuan), yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki populasi UMKM yang aktif, beragam dalam sektor usahanya, serta memiliki akses yang memadai terhadap program pelatihan dan sosialisasi akuntansi. Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh variasi data yang mencerminkan kompleksitas dan spektrum penerapan SAK ETAP/EMKM di lapangan, mulai dari UMKM yang masih manual hingga yang telah menggunakan sistem digital sepenuhnya.

Subjek penelitian adalah individu kunci dalam operasional UMKM, yaitu pemilik, manajer keuangan, atau staf administrasi keuangan yang secara langsung bertanggung jawab atas kegiatan

pencatatan dan pelaporan keuangan. Kriteria inklusi subjek ditetapkan secara ketat untuk menjamin relevansi data: (1) UMKM yang telah berdiri minimal dua tahun, menunjukkan stabilitas dan akumulasi pengalaman pencatatan; (2) memiliki catatan transaksi keuangan yang terstruktur, baik dalam format manual maupun digital; dan (3) bersedia untuk diwawancarai secara mendalam dan berbagi dokumen keuangan yang relevan, dengan jaminan kerahasiaan, untuk kepentingan penelitian.

Jumlah partisipan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara statistik di awal, melainkan secara bertahap melalui teknik *snowball sampling*. Teknik ini dinilai paling efektif dalam penelitian kualitatif studi kasus, karena subjek baru diperoleh berdasarkan rekomendasi dari informan awal yang dinilai memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang sangat relevan tentang penerapan SAK ETAP dan penggunaan teknologi akuntansi. Proses pengambilan sampel dihentikan ketika data yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan teoritis (*saturation*), yaitu ketika tidak ada lagi informasi atau tema baru yang signifikan muncul dari wawancara atau observasi berikutnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, diawali dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci dan naratif. Pertanyaan fokus pada latar belakang usaha, pengalaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, tingkat pemahaman mereka terhadap prinsip akuntansi dasar serta SAK ETAP/EMKM, penggunaan spesifik sistem informasi akuntansi, hingga berbagai tantangan dan hambatan struktural yang mereka alami. Seluruh wawancara dilakukan dengan persetujuan informed consent dari narasumber dan direkam untuk keperluan transkripsi serta analisis verbatim yang otentik.

Metode kedua adalah observasi partisipatif dengan tingkat keterlibatan yang moderat. Peneliti mengunjungi langsung lokasi usaha, mengamati praktik pencatatan keuangan sehari-hari, alur kerja akuntansi, penggunaan perangkat lunak akuntansi (jika tersedia), interaksi antara pemilik dan staf keuangan, serta sarana teknologi yang digunakan dalam mendukung proses pembukuan. Observasi ini tidak hanya memperkuat data yang diklaim melalui wawancara (triangulasi teknik), tetapi juga memberikan konteks visual dan empirik yang vital tentang bagaimana UMKM menjalankan sistem keuangannya dalam lingkungan operasional yang sebenarnya.

Sebagai pelengkap dan untuk memverifikasi temuan, peneliti melakukan studi dokumentasi. Dokumen pendukung yang dikumpulkan meliputi catatan kas harian, laporan laba rugi, neraca, buku besar, laporan keuangan akhir tahun, bukti transfer bank, hingga bukti pelatihan akuntansi yang pernah diikuti. Termasuk pula pengumpulan tangkapan layar atau akses terbatas terhadap software atau aplikasi akuntansi tertentu yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Studi dokumentasi ini menjadi landasan empiris yang kuat untuk menilai kualitas aktual dari pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM.

Setelah seluruh data terkumpul dan terorganisasi, proses analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik. Analisis dimulai sejak fase awal pengumpulan data (analisis berkelanjutan), dilakukan secara iteratif agar setiap temuan awal dapat diarahkan untuk menggali informasi yang lebih spesifik dan terperinci di tahap pengumpulan data berikutnya. Langkah pertama adalah transkripsi data wawancara secara verbatim, dilanjutkan dengan pengorganisasian data observasi dan dokumentasi ke dalam format yang mudah diakses dan dianalisis, seperti catatan lapangan dan database digital.

Data yang telah disusun ini kemudian dikodekan menggunakan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau ATLAS.ti. Pengkodean dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti tingkat literasi keuangan pelaku usaha terhadap SAK ETAP, peran sistem informasi akuntansi dalam proses pencatatan, hambatan struktural dan kultural dalam implementasi pelaporan keuangan, serta strategi adaptasi UMKM terhadap tuntutan akuntabilitas dan teknologi digital. Setelah tema-tema terkumpul, peneliti melakukan reduksi data guna menyederhanakan informasi tanpa menghilangkan makna penting.

Dalam menjaga validitas dan keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber dan teknik dilakukan secara ketat, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data dari observasi serta dokumen yang dikumpulkan. Triangulasi ini memastikan bahwa temuan memiliki konsistensi internal yang kuat dan tidak bias hanya dari satu jenis data atau informan. Hasil akhir disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan interpretatif, diperkaya dengan kutipan langsung dari informan untuk memberikan nuansa otentik dan dukungan empiris.

Strategi keabsahan kedua adalah pelaksanaan member *check*, di mana transkrip atau hasil interpretasi awal yang krusial dikembalikan kepada narasumber untuk dikonfirmasi atau diperbaiki apabila ada kekeliruan interpretasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas data dengan memverifikasi pandangan peneliti terhadap realitas informan. Ketiga, peneliti menyusun audit trail, yaitu dokumentasi sistematis atas seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis. Audit trail ini memungkinkan pihak lain untuk menelusuri kembali langkah-langkah yang dilakukan, sehingga transparansi dan akuntabilitas proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek etika menjadi perhatian penting, di mana informed consent diambil dari setiap partisipan setelah mereka diberikan penjelasan rinci mengenai maksud, tujuan, dan hak-hak mereka, termasuk hak untuk menolak berpartisipasi. Kerahasiaan identitas informan dijamin melalui penggunaan nama samaran atau kode khusus. Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan kualitatif inheren: hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh populasi UMKM di Indonesia, karena sifatnya yang sangat kontekstual dan mendalam. Fokus utama adalah untuk memberikan pemahaman yang kaya terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menyadari dan mengelola keterbatasan ini secara terbuka, diharapkan hasil penelitian tetap memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penerapan SAK ETAP dan peran teknologi di era digital

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian studi kasus kualitatif ini menghasilkan temuan yang sangat kaya dan mendalam mengenai dinamika implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di lingkungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Temuan ini menegaskan bahwa praktik akuntansi UMKM berada dalam spektrum yang sangat beragam, namun menunjukkan pola yang konsisten: adopsi SAK ETAP seringkali didorong oleh motivasi eksternal yang sangat dominan, yaitu kebutuhan mendesak untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan *non-bank*. Observasi mendalam dan wawancara dengan para informan mengindikasikan bahwa UMKM, terutama pada kelompok yang menunjukkan upaya formalisasi laporan, memandang laporan keuangan terstandar sebagai prasyarat administratif yang wajib dipenuhi untuk memenuhi tuntutan kreditur, bukan sebagai alat strategis yang integral untuk pengambilan keputusan internal, seperti penetapan harga, perencanaan investasi, atau pengendalian biaya. Fenomena ini diperkuat oleh pengakuan Informan A, pemilik UMKM sektor perdagangan, yang menyatakan dengan lugas bahwa prioritas utama dalam penyusunan laporan adalah memastikan dokumen tersebut *bankable* dan dapat lolos verifikasi pinjaman, bahkan jika hal itu berarti mengesampingkan apakah laporan tersebut sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi secara substansial. Pandangan ini menyoroti diskrepansi fundamental antara tujuan regulasi standar (meningkatkan kualitas informasi) dan tujuan praktis pelaku usaha (mendapatkan pembiayaan).

Meskipun terdapat niat baik dan upaya formalisasi, temuan kunci dan paling signifikan dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi substansial antara laporan keuangan yang disajikan (Neraca dan Laba Rugi) dengan prinsip-prinsip SAK ETAP. Analisis mendalam terhadap catatan dan dokumen yang dikumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas entitas masih didominasi oleh basis akuntansi kas dalam praktik pencatatan harian mereka. Hal ini menghasilkan laporan yang, meskipun secara format menyerupai Neraca dan Laba Rugi, namun tidak memenuhi prinsip akrual SAK ETAP. Kesulitan kognitif yang paling umum ditemukan adalah pada pengakuan transaksi yang tidak melibatkan kas secara langsung, seperti pencatatan piutang dan utang dagang, serta penentuan beban penyusutan aset tetap item-item yang esensial dalam menentukan posisi keuangan yang sebenarnya. Transaksi-transaksi non-kas ini seringkali diabaikan atau baru dicatat secara formal melalui estimasi subjektif menjelang akhir periode pelaporan, khusus untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Resistensi terhadap prinsip akrual ini berakar pada minimnya pemahaman akuntansi dasar di kalangan pemilik atau staf keuangan, yang menganggap prinsip akrual SAK ETAP terlalu teoretis dan menambah kerumitan yang tidak perlu, seperti yang dikeluhkan oleh Informan B. Kesenjangan pemahaman ini, yang terkait erat dengan *Human Capital Theory*, menjadi tembok penghalang utama dalam implementasi, bahkan setelah SAK ETAP dirancang lebih sederhana dibandingkan SAK Umum berbasis IFRS.

Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa faktor edukasi dan sosialisasi yang selama ini digalakkan oleh pemerintah dan lembaga pendamping terbukti tidak efektif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Mayoritas informan mengakui pernah mengikuti pelatihan SAK ETAP atau manajemen keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga terkait, namun kritik keras dilontarkan terhadap kualitas program tersebut. Pelatihan dinilai terlalu umum, bersifat *one-off* (hanya

sekali pertemuan), dan minim praktik *hands-on* yang relevan dengan kasus bisnis spesifik UMKM mereka. Materi yang disampaikan seringkali menggunakan bahasa akuntansi yang formal dan sulit dicerna oleh pelaku usaha yang berlatar belakang non-akuntansi. Ketiadaan pendampingan atau *mentoring* berkelanjutan pasca-pelatihan menyebabkan pengetahuan SAK ETAP yang diperoleh hanya bersifat memori jangka pendek dan gagal diinternalisasi atau diterapkan dalam praktik rutin akuntansi UMKM. Hal ini menegaskan bahwa modal pengetahuan yang didapatkan tidak diubah menjadi modal praktik.

Selain itu, umur usaha juga menjadi faktor pembeda yang signifikan dalam kecenderungan UMKM untuk mengadopsi standar akuntansi. UMKM yang telah berdiri lebih lama (di atas 5 tahun) cenderung menunjukkan *willingness to change* yang lebih tinggi, didorong oleh visi ekspansi jangka panjang yang menuntut laporan keuangan yang lebih kredibel, baik untuk menarik investor maupun untuk membangun *track record* yang baik di mata perbankan. Mereka telah melewati berbagai fase pertumbuhan dan menyadari bahwa pencatatan manual atau basis kas sederhana tidak lagi memadai untuk mengukur kinerja yang kompleks. Sebaliknya, UMKM yang masih relatif baru (2-3 tahun) cenderung lebih fokus pada kelangsungan hidup (*survival*) dan memprioritaskan penjualan daripada kepatuhan akuntansi, sehingga formalisasi laporan keuangan menjadi urutan kesekian.

Dalam konteks Era Digital yang semakin menguat, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan teknologi muncul sebagai *enabler* yang signifikan dan tak terhindarkan, meskipun dengan catatan kritis. Ditemukan adanya migrasi cepat dari pembukuan manual ke solusi digital, baik melalui aplikasi akuntansi *mobile* berbasis *cloud* (yang sangat populer karena kemudahannya) maupun penggunaan *spreadsheet* canggih yang dirancang khusus. Meskipun teknologi ini secara efektif meningkatkan efisiensi, kecepatan pemrosesan, dan formalitas penyajian laporan, penelitian menemukan batasan fundamental: teknologi tidak dapat menggantikan pemahaman akuntansi dasar. Informan C dengan lugas menyimpulkan bahwa meskipun aplikasinya mampu menghasilkan laporan yang terlihat sempurna dan terstruktur, akurasi substansial laporan tersebut sepenuhnya bergantung pada kualitas input dan *judgment* akuntansi dari penggunaannya. SIA dengan demikian berfungsi sebagai akselerator proses, yang mana bila digunakan oleh pengguna yang lemah dalam SAK ETAP, hanya akan mempercepat formalisasi laporan yang secara substansi mengandung kesalahan, melahirkan ilusi akuntabilitas yang berbahaya.

Hambatan dan strategi adaptasi UMKM juga teridentifikasi secara jelas, menyoroti realitas keterbatasan sumber daya. Hambatan utama mencakup keterbatasan alokasi waktu dan biaya. Pengeluaran untuk software akuntansi yang mumpuni dengan fitur kepatuhan SAK ETAP atau jasa akuntan profesional penuh waktu seringkali dianggap sebagai beban yang tidak proporsional dengan skala usaha dan margin keuntungan mereka. Untuk mengatasi dilema sumber daya manusia ini, UMKM yang menunjukkan praktik terbaik mengadopsi strategi SDM fleksibel, yaitu menggunakan jasa akuntan *freelance* atau *virtual* secara periodik (misalnya, triwulanan atau tahunan) alih-alih merekrut staf penuh waktu. Strategi ini memungkinkan UMKM mengakses keahlian SAK ETAP dan mendapatkan jasa penyesuaian akhir periode dengan model biaya variabel yang jauh lebih terjangkau.

Selain mengadopsi SDM fleksibel, UMKM yang progresif juga menunjukkan strategi adaptasi teknologi yang cerdas. Mereka mengadopsi strategi integrasi aplikasi, menggunakan aplikasi *Point of Sale* (POS) untuk input cepat transaksi harian dan pengelolaan inventori, dan kemudian mengeksport data tersebut ke *spreadsheet* atau platform akuntansi yang lebih kompleks untuk penyesuaian akhir periode. Pendekatan hibrida ini memungkinkan mereka menyeimbangkan kebutuhan efisiensi transaksi harian dengan tuntutan kepatuhan SAK ETAP yang periodik. Strategi adaptif ini menunjukkan upaya pragmatis UMKM dalam mencari keseimbangan optimal antara efisiensi digital dan tuntutan akuntabilitas standar, mencerminkan adanya *trade-off* yang disadari antara akurasi penuh dan kepraktisan operasional.

Pembahasan mengenai penerapan SAK ETAP pada UMKM, berdasarkan hasil studi kasus ini, menguatkan dan memperluas literatur yang ada dengan menempatkan fenomena akuntansi UMKM dalam konteks Era Digital dan pembiayaannya. Temuan bahwa motivasi utama UMKM untuk menerapkan standar adalah kebutuhan untuk akses permodalan dapat diinterpretasikan melalui lensa Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam model ini, terdapat *asymmetric information* antara UMKM (sebagai agen, yang tahu persis kondisi keuangannya) dan bank atau kreditur (sebagai prinsipal, yang menghadapi risiko ketidakpastian). Laporan keuangan SAK ETAP bertindak sebagai instrumen pensinyalan (*signaling*) yang digunakan oleh UMKM untuk mengurangi risiko *asymmetric information* tersebut dan meningkatkan kepercayaan. Namun, sinyal yang dikirimkan seringkali bersifat formalitas penyajian untuk memenuhi persyaratan minimum.

Kecenderungan UMKM untuk fokus pada formalitas penyajian sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam SAK ETAP yang secara eksplisit menekankan keseimbangan antara biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*). UMKM cenderung meminimalkan biaya kognitif dan waktu untuk kepatuhan substansial (prinsip akrual penuh) dan memilih untuk berinvestasi pada tampilan laporan yang memenuhi syarat minimum eksternal. Hal ini secara teori menghasilkan sinyal yang belum sepenuhnya andal, namun secara praktik dianggap memadai untuk membuka pintu akses kredit. Dengan kata lain, mereka melakukan *token compliance* atau kepatuhan simbolis, yang meskipun tidak sempurna, merupakan langkah maju dari pencatatan kas total.

Kesenjangan substansial dalam penerapan SAK ETAP ditemukan berakar kuat pada hambatan kognitif yang dialami pelaku UMKM, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya kompetensi SDM di bidang akuntansi. Hambatan ini, yang terkait erat dengan Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*), menunjukkan bahwa rendahnya investasi dalam pendidikan akuntansi formal dan non-formal secara serius menghambat kemampuan UMKM untuk menginternalisasi prinsip-prinsip dasar seperti akrual, konsep pemisahan entitas, dan *matching principle*. Kegagalan investasi modal manusia ini diperparah oleh temuan mengenai inefektivitas sosialisasi dan pelatihan yang bersifat *one-off* dan terlalu teoretis, yang menegaskan bahwa program edukasi konvensional tidak sesuai dengan gaya belajar dan keterbatasan waktu operasional pelaku usaha UMKM.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang jelas, yaitu perlunya pergeseran paradigma sosialisasi SAK ETAP. Program harus diubah dari model pelatihan formal menjadi pendampingan praktis dan berkelanjutan (*hands-on mentoring*). *Mentoring* yang efektif harus menggunakan modul yang berorientasi pada kasus bisnis spesifik UMKM, menggunakan transaksi nyata mereka sebagai contoh, dan berlangsung secara periodik di lokasi usaha mereka. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pengetahuan akuntansi yang diperoleh tidak hanya teoritis tetapi dapat langsung diimplementasikan dan diinternalisasi ke dalam praktik rutin pembukuan, sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan waktu operasional pelaku usaha.

Dalam lanskap modern, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan teknologi memegang peran kritis dalam memenuhi karakteristik kualitatif SAK ETAP, khususnya ketepatan waktu dan relevansi laporan. Penelitian ini memvalidasi literatur yang menyatakan bahwa SIA secara positif meningkatkan efisiensi dan formalitas laporan keuangan UMKM. Namun, temuan ini juga membawa peringatan penting yang harus dipertimbangkan oleh regulator dan penyedia teknologi: SIA adalah akselerator proses, bukan substitusi pengetahuan akuntansi. Ketika UMKM yang minim pemahaman SAK ETAP menggunakan SIA, teknologi hanya mempercepat formalisasi praktik akuntansi kas atau kesalahan *input* data yang dilakukan secara manual, yang pada akhirnya menciptakan "ilusi akuntabilitas" laporan yang terlihat terstruktur dan profesional tetapi secara substansial tidak akurat dan berpotensi menyesatkan kreditur.

Oleh karena itu, tantangan di era digital bukan lagi ketersediaan alat (karena aplikasi *cloud* sudah banyak dan murah), melainkan bagaimana mensinkronkan kecerdasan teknologi (kemampuan otomatisasi SIA) dengan kecerdasan akuntansi (pemahaman SAK ETAP/EMKM pengguna). Intervensi harus berfokus pada pengembangan SIA yang dirancang agar secara otomatis dapat memaksakan kepatuhan pada prinsip-prinsip SAK ETAP yang disederhanakan, misalnya dengan sistem peringatan otomatis untuk pencatatan piutang atau beban penyusutan. Sistem ini harus meminimalisasi *judgment* pengguna yang rentan kesalahan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM berbasis SAK ETAP merupakan fungsi ganda yang dimoderasi: SIA mempercepat proses, sementara pemahaman SAK ETAP menjamin substansi. Strategi adaptasi UMKM, seperti penggunaan SDM fleksibel dan integrasi aplikasi, menunjukkan respons rasional terhadap keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, intervensi kebijakan di masa depan harus bersifat komprehensif, dengan fokus pada dua pilar utama: pertama, peningkatan pemahaman akuntansi dasar melalui program *hands-on mentoring* yang berkelanjutan; dan kedua, mendorong pengembangan serta subsidi SIA yang *smart*, yang mampu memandu pengguna secara intuitif menuju kepatuhan SAK ETAP/EMKM, sekaligus memperkuat sinyal *bankable* UMKM tanpa mengorbankan integritas substansial laporan keuangan mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan dari studi kasus kualitatif yang mendalam ini secara tegas mengukuhkan bahwa upaya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mencapai kualitas laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah proses yang sarat

dinamika dan berada di persimpangan kritis antara tuntutan eksternal (regulasi dan kreditur) dan keterbatasan internal (sumber daya dan kompetensi). Penelitian ini secara konsisten menemukan bahwa motivasi utama UMKM untuk mengadopsi SAK ETAP bukanlah didorong oleh kesadaran internal akan peningkatan tata kelola atau alat manajerial yang superior. Sebaliknya, adopsi standar ini merupakan kebutuhan pragmatis yang mendesak untuk mengakses modal kerja, utamanya dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, SAK ETAP diperlakukan sebagai instrumen formalitas dan sinyal kepatuhan (*signaling*) kepada pihak eksternal, yang berimplikasi pada fokus penyusunan laporan yang lebih mengutamakan kelengkapan format administratif (kepatuhan simbolis) daripada akurasi substansi akuntansi (kepatuhan substantif). Perlakuan ini secara inheren menciptakan risiko *asymmetric information* baru, di mana laporan yang disajikan tampak rapi, namun memiliki integritas substansial yang rentan dipertanyakan.

Kesenjangan terbesar dan paling fundamental yang ditemukan dalam implementasi SAK ETAP terletak pada hambatan kognitif dan resistensi mendalam UMKM terhadap prinsip akrual. Analisis dokumen dan wawancara menegaskan bahwa laporan yang dihasilkan sebagian besar UMKM masih didominasi oleh basis akuntansi kas. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa penyederhanaan SAK ETAP, meskipun telah mengurangi kompleksitas IFRS, belum sepenuhnya berhasil menjembatani jurang pemahaman akuntansi di kalangan pemilik atau staf keuangan non-akuntansi. Kesulitan dalam menginternalisasi konsep seperti pencatatan piutang, utang, dan penentuan beban penyusutan secara akrual menjadi bukti nyata bahwa masalah akuntansi UMKM bukan hanya pada standar yang terlalu rumit, tetapi pada fondasi literasi keuangan yang lemah. Hambatan ini diperparah oleh inefektivitas program sosialisasi yang ada, yang bersifat *one-off* dan terlalu teoretis. Program-program ini gagal menyediakan pendampingan praktis dan berkelanjutan (*hands-on mentoring*) yang sesungguhnya dibutuhkan oleh UMKM untuk menginternalisasi prinsip-prinsip standar ke dalam operasional pencatatan sehari-hari mereka.

Di tengah konteks Era Digital, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) muncul sebagai akselerator kunci yang berhasil memberikan dampak positif signifikan. SIA terbukti meningkatkan efisiensi, kecepatan pemrosesan data, dan formalitas penyajian laporan keuangan UMKM, sehingga membantu UMKM memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang menuntut ketepatan waktu (*timeliness*) dan relevansi. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan teknologi telah menarik minat UMKM untuk bermigrasi dari pencatatan manual. Namun, temuan ini juga menghasilkan peringatan krusial: teknologi, meskipun *powerful*, hanya berfungsi sebagai alat bantu; kualitas substansial laporan yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada tingkat pemahaman SAK ETAP oleh penggunanya. Jika pemahaman akuntansi dasar pengguna lemah, SIA hanya akan menyistematiskan dan mempercepat kesalahan *input* data dan praktik berbasis kas tersebut, menciptakan ilusi transparansi atau ilusi akuntabilitas yang berbahaya bagi manajemen internal maupun proses *due diligence* lembaga keuangan. Oleh karena itu, tantangan di era digital bergeser dari ketersediaan teknologi menjadi sinkronisasi antara kecerdasan teknologi dan kecerdasan akuntansi pengguna.

UMKM yang berhasil menunjukkan laporan keuangan yang lebih baik, atau setidaknya telah mencapai tingkat formalitas yang lebih tinggi, mengadopsi strategi adaptasi yang pragmatis dan cerdas untuk mengatasi kendala sumber daya. Strategi ini meliputi penggunaan SDM fleksibel; alih-alih menanggung beban biaya karyawan penuh waktu, mereka memilih menggunakan jasa akuntan *freelance* atau *virtual* secara periodik untuk fungsi penyesuaian akhir periode yang membutuhkan keahlian SAK ETAP. Strategi kedua adalah integrasi aplikasi; mereka secara cerdas menggabungkan efisiensi aplikasi Point of Sale (POS) atau pencatat transaksi harian untuk *input* cepat dengan *software* akuntansi yang lebih kompleks untuk proses penyesuaian akhir periode. Adaptasi ini menunjukkan bahwa UMKM bersedia berinvestasi pada keahlian SAK ETAP, asalkan biayanya fleksibel, proporsional dengan skala usaha, dan tidak mengganggu alokasi waktu kritis mereka untuk kegiatan inti usaha dan penjualan. Ini adalah bukti rasionalitas ekonomi UMKM dalam menghadapi tuntutan regulasi.

Secara teoretis, studi kasus ini memberikan kontribusi penting dengan mengkonfirmasi dan memperluas kerangka Teori Keagenan. Penelitian menegaskan bahwa kepatuhan SAK ETAP bagi UMKM adalah respons strategis yang berorientasi pada *signaling* eksternal untuk mengurangi *asymmetric information*, yang sayangnya rentan terhadap kompromi substansial karena adanya *trade-off* biaya manfaat. Selain itu, temuan ini memperkuat relevansi Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*), menegaskan bahwa investasi dalam peningkatan kompetensi SDM di bidang akuntansi harus diprioritaskan di atas investasi teknologi semata. Tanpa pondasi pemahaman akuntansi yang kokoh

(*human capital*), teknologi (*technological capital*) akan menghasilkan kegagalan implementasi yang cepat dan tersistematisasi.

Implikasi praktis yang paling mendesak dari penelitian ini adalah perlunya revolusi mendasar dalam metode sosialisasi SAK ETAP. Otoritas dan lembaga pembina UMKM, seperti Kementerian, Dinas Koperasi, dan Perbankan, disarankan untuk mengalihkan fokus dari *workshop* masal dan seminar yang bersifat *one-off* menjadi program pendampingan intensif dan berkelanjutan. Program ini harus berbasis studi kasus spesifik sektor (misalnya: akuntansi untuk warung kopi berbeda dengan akuntansi untuk *e-commerce*), dan melibatkan akuntan praktisi atau mentor dengan pengalaman langsung di lapangan. Pendekatan *mentoring* ini akan lebih efektif menjembatani jurang kognitif antara prinsip akuntansi yang abstrak dengan praktik bisnis UMKM yang sangat dinamis.

Implikasi kebijakan penting lainnya yang muncul dari temuan kritis tentang ilusi akuntabilitas adalah kebutuhan untuk mendorong pengembangan SIA yang secara *default* memaksakan kepatuhan pada SAK ETAP. Pemerintah, bekerja sama dengan asosiasi *software* dan *fintech*, harus menetapkan standar fungsional. Pengembang *software* harus merancang fitur yang secara otomatis dapat meminimalkan risiko kesalahan manusia, seperti memastikan pemisahan entitas yang ketat (misalnya: memblokir pengeluaran pribadi dari akun bisnis), dan secara otomatis mengarahkan *input* data transaksi menuju basis akrual yang disederhanakan, misalnya dengan sistem *reminder* otomatis untuk pengakuan penyusutan atau pemisahan kas bank dan kas kecil. Subsidi atau insentif pajak dapat diberikan bagi UMKM yang mengadopsi SIA bersertifikasi *compliance* ini.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang melekat pada studi kasus kualitatif. Fokus yang mendalam pada sejumlah kecil UMKM yang spesifik di wilayah tertentu membuat temuan ini tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke seluruh populasi UMKM yang sangat heterogen di Indonesia. Hasil ini bersifat kontekstual dan hanya berfokus pada memberikan pemahaman interpretatif yang kaya, bukan kesimpulan kuantitatif. Keterbatasan lain terkait dengan potensi subjektivitas interpretasi data dari pihak peneliti dan keterbatasan data dokumentasi yang disajikan oleh UMKM, terutama mengingat masih adanya praktik pencatatan ganda atau pencatatan yang tidak lengkap. Upaya triangulasi (*member check* dan *audit trail*) telah dilakukan secara ketat untuk memitigasi bias ini, namun sifat penelitian kualitatif tetap mengutamakan kedalaman daripada cakupan kuantitas.

Sebagai penutup, berdasarkan temuan yang ada, rekomendasi penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk berfokus pada penelitian aksi (*action research*). Studi masa depan perlu melibatkan pendampingan UMKM secara langsung dalam mengimplementasikan SIA berbasis SAK ETAP (atau SAK EMKM) dalam periode waktu yang terukur (misalnya 6-12 bulan). Pendekatan *action research* ini dapat secara empiris menguji model sosialisasi dan teknologi yang paling efektif yaitu kombinasi antara *hands-on mentoring* dan *compliance-forced* SIA dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM secara berkelanjutan dan substansial di Era Digital. Pengujian model ini akan memberikan bukti nyata bagi otoritas kebijakan untuk merumuskan intervensi yang benar-benar transformatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengurus koperasi yang telah bersedia menjadi objek penelitian. Kesediaan mereka untuk memberikan data dan informasi secara terbuka mengenai praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menjadi fondasi utama bagi penyusunan jurnal ini. Tanpa keterlibatan mereka, kajian tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) maupun SAK Entitas Privat tidak akan dapat tergambarkan secara nyata.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para peneliti sebelumnya yang telah memberikan kontribusi pemikiran melalui berbagai jurnal ilmiah, seperti Amalia dkk., Ariesta dan Nurhidayah, Ayuningtyas, serta Lijow dkk., yang menjadi rujukan penting dalam memahami tantangan implementasi SAK ETAP di berbagai sektor usaha. Pemikiran mereka mengenai hambatan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi pada pelaku UMKM telah memperkaya sudut pandang penulis dalam menyusun kerangka analisis yang lebih komprehensif. Demikian pula, penelitian dari Maulana dkk., Rizky dkk., serta Simarmata dan Afriani telah memberikan inspirasi dalam melihat peran sistem informasi akuntansi, pemahaman akuntansi, serta pengendalian internal sebagai faktor penentu keberhasilan pelaporan keuangan.

Tidak lupa, penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing dan para akademisi yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan berharga dalam setiap tahap penyusunan jurnal. Berbagai diskusi ilmiah yang terbangun bersama rekan-rekan mahasiswa juga turut memperkaya pemikiran penulis dalam merumuskan masalah dan menyusun solusi yang relevan dengan kondisi empiris di lapangan. Dukungan emosional dan moral dari keluarga, sahabat, serta rekan seperjuangan menjadi penyemangat terbesar yang menjaga konsistensi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini hingga tuntas.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah menyediakan pedoman resmi berupa SAK ETAP maupun SAK Entitas Privat yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Keberadaan standar akuntansi yang disederhanakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik telah memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat turut mendukung upaya sosialisasi dan implementasi standar akuntansi secara lebih merata.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang pelaporan keuangan UMKM dan koperasi berbasis SAK ETAP maupun SAK Entitas Privat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, R., Suratminingsih, & Hanif, H. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Cileungsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Profesional (JIAKPRO)*. <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/JIAKPRO/article/view/269> Diakses 10 September 2025
- [2] Ariesta, C., & Nurhidayah, F. (2020). *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Berbasis SAK-ETAP pada UMKM (Studi Kasus pada Elden Coffee & Eatery)*. Universitas Pembangunan Jaya. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENERAPAN+PENYUSUNAN+LAPORAN+KEUANGAN++NERACA+BERBASIS+SAK-ETAP+PADA+UMKM+&btnG. Diakses 12 September 2025
- [3] Ayuningtyas, P. C. (2023). Penerapan Pencatatan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perusahaan Jasa Advertising Berbasis SAK ETAP (Studi Kasus pada CV. Syahir Putra Sakti). *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi (SBAMER)*. Diakses dari <https://dhsjournal.id/index.php/SBAMER/article/view/41> diakses 10 September 2025
- [4] Efendi, R. (2017). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [5] Hasibuan, F. R. Z., & Indayani. (2021). *The Effect of Application of SAK-ETAP, Internal Control System, and Capacity of Cooperatives on the Development of Business in Cooperatives in Banda Aceh City*. The Proceedings of the International Conference on Applied Economics (ICAIE). https://www.researchgate.net/publication/349190372_The_Effect_of_Application_of_SAK-ETAP_Internal_Control_System_and_Capacity_of_Cooperatives_on_the_Development_of_Business_in_Cooperatives_in_Banda_Aceh_City Diakses 15 September 2025
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: IAI.
- [7] Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- [8] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (Vol. 1–2). Hoboken: Wiley.
- [9] Lijow, T. F., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33284>. Diakses 10 September 2025
- [10] Maulana, J., Marismiati, & Wirakanda, G. G. (2023). Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ. *Land Journal: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*. doi:10.47491/landjournal.v4i1.2985. Diakses 14 September 2025
- [11] Rizky Adithya, Sari, W. A., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya). *E-Bis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Diakses dari <https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/E-Bis/article/view/881>. Diakses 10 September 2025
- [12] Simarmata, J., & Afriani, A. N. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis (Jekobis)*. <https://www.ojs.jekobis.org/index.php/liabilitas/article/view/81>. Diakses 10 September 2025
- [13] Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- [14] Wailan'An, E. J., & Pandia, S. E. N. S. (2024). Digital accounting based on SAK ETAP: financial reporting quality as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/download/36401/15639>. Diakses 10 September 2025
- [15] Wilestari, M., & Safitri, D. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bekasi Selatan)*. *Akrual: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/a388/3153643afa437abc1e1018a7896d39a7fba8.pdf>. Diakses 14 September 2025